

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Penyelenggaraan otonom berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah (Rizki dan Munandar, 2021).

Asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten/kota, untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintah dapat tercapai. Dengan kata lain daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka

diperlukan adanya sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dalam rangka perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah harus bisa menggali potensi yang dimiliki daerahnya. Kemandirian suatu daerah sebagai bentuk keberhasilan penerapan otonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah akan mendorong kemampuan keuangan daerah dan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap pusat. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan daerahnya dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, sumber, penggunaan sumber daya ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada suatu periode akuntansi yang disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu bagian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran berisikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan pada suatu entitas pelaporan (Manimbaga dkk, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah seperti yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didasarkan atas asas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Struktur APBD yang memuat komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan ringkasan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kapabilitas pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mencakup urusan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang dapat dilihat melalui dokumen APBD (Halim & Kusufi, 2007).

Dalam hal pengukuran terhadap transparansi dan tanggungjawab atas pengelolaan APBD, penyusunan atas pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diinstruksikan oleh pemerintah pusat (Nordiawan, 2018). Melalui LKPD dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangannya yang diukur dengan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2017-2021, dapat diketahui besarnya pendapatan asli yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah/PAD(RP)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah/PAD(RP)	Presentase (%)
2017	207.804.696.398,00	229.137.473.528,55	110,27%
2018	177.648.571.543,00	171.490.709.096,75	96,53%
2019	195.336.408.043,00	185.051.575.342,52	94,73%
2020	163.030.592.170,00	167.530.108.045,48	102,76%
2021	190.782.982.758,00	166.266.172.886,05	87,15%

Sumber : BKAD Kota Kupang, 2022

Dari tabel 1.1 dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi yaitu dimulai pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp229.137.473.528,55 atau sebesar 110,27% dari target yang ditentukan. Dan pada tahun 2018 presentase realisasi PAD mengalami penurunan yaitu dari 110,27% menjadi 96,53%. Pada tahun 2019 dan 2020 presentase realisasi PAD Kota Kupang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 96,53% menjadi 94,73% dan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 94,73% menjadi 102,76%. Namun pada tahun 2021 presentase realisasi mengalami penurunan yaitu dari 102,76% menjadi 87,15%. Menurunnya presentase PAD ini terjadi karena realisasi PAD yang diperoleh tidak mencapai target yang ditentukan. Sehingga dengan demikian dilihat dari presentase realisasi PAD Kota Kupang yang mengalami fluktuasi dan tidak tercapainya target yang telah direncanakan menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Kupang terutama penerimaan yang bersumber dari PAD belum optimal dan reaktif kecil.

Selain penerimaan PAD belanja daerah sebagai pengeluaran daerah Kota Kupang perlu dilihat sebagai pengurangan kas daerah yang dikeluarkan

pemerintah daerah dalam suatu periode akuntansi. Adapun belanja daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentase (%)
2017	1.295.479.477.301,63	1.156.827.853.679,43	89,30%
2018	1.279.060.055.084,13	1.176.772.138.082,80	92,00%
2019	1.289.163.410.929,70	1.177.805.740.087,88	91,36%
2020	1.208.071.669.855,00	1.145.885.087.010,25	94,85%
2021	1.184.901.334.565,00	1.100.199.348.375,47	92,85%

Sumber : BKAD Kota Kupang, 2022

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi dimulai pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Kota Kupang sebesar Rp1.156.827.853.679,43 atau sebesar 89,30% dari target yang ditentukan. Dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 presentase realisasi belanja daerah menunjukkan presentase yang cukup baik dan mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018 menunjukkan kenaikan dari 89,30% menjadi 92,00% dan pada tahun 2019 presentase realisasi belanja daerah mengalami penurunan dari 92,00% menjadi 91,36%. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami presentase yang baik dari belanja daerah yaitu realisasi belanja daerah meningkat dari 91,36% menjadi 94,85%. Namun pada tahun 2021 belanja daerah mengalami penurunan dengan presentase realisasi belanja daerah Kota Kupang turun dari 94,85% menjadi 92,85%.

Sehingga dengan demikian jika dilihat dari presentase realisasi belanja daerah pemerintah Kota Kupang mengalami fluktuasi dan dilihat dari realisasi belanja daerah tidak melebihi dari target atau anggaran yang ditentukan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek efektivitas PAD ?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek derajat kontribusi BUMD ?
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek keserasian belanja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek efektivitas PAD.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek derajat kontribusi BUMD.

4. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari aspek keserasian belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang diteliti, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaatnya yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah yang berlaku. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kupang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya

diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan daerah.